



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
KECAMATAN ALUH ALUH
TAHUN 2022
KABUPATEN BANJAR

JALAN INPRES NO. 132 DESA ALUH ALUH BESAR
KECAMATAN ALUH ALUH KABUPATEN BANJAR
KALIMANTAN SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022 ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum,serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2016-2022, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022 ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Aluh - Aluh sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022 ini kami buat, semoga dapat memberikan manfaat,baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Aluh - Aluh, 31 Desember 2022
Camat Aluh - Aluh



ADITYA YUDI DHARMA, SSTP
NIP. 19860313 200412 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN.....	5
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	5
C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	7
D. ISU STRATEGIS.....	9
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	11
B. PERJANJIAN KINERJA.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN,	39
C. REALISASI ANGGARAN.....	42
D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2022	49
BAB IV PENUTUP.....	52
A. KESIMPULAN	52
Lampiran.....	54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Aluh -Aluh Kabupaten Banjar tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Perubahan Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar 2016 - 2022 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Cukup Berhasil** dengan capaian kinerja **88,24%**

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga

tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Aluh - Aluh berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Aluh - Aluh adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
APBD	Rp. 2.153.076.141,00	Rp 2.173.142.141,00

Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
BELANJA DAERAH	2.202.684.141,00	1.783.957.490,00	80,99	1.458.620.942,00
BELANJA OPERASI	2.173.142.141,00	1.754.661.490,00	80,74	1.388.470.942,00
Belanja Pegawai	1.595.777.740,00	1.217.230.642,00	76,28	941.849.195,00
Belanja Barang dan Jasa	577.364.401,00	537.430.848,00	93,08	446.621.747,00
BELANJA MODAL	29.542.000,00	29.296.000,00	99,17	70.150.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.542.000,00	29.296.000,00	99,17	70.150.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(2.202.684.141,00)	(1.783.957.490,00)	80,99	(1.458.620.942,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.202.684.141,00)	(1.783.957.490,00)	80,99	(1.458.620.942,00)

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Aluh - Aluh
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Aluh - Aluh
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Aluh – Aluh kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Aluh - Aluh
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Aluh - Aluh

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh (*SKPD*) Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Aluh - Aluh Kab. Banjar Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permen KL terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Aluh - Aluh
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja SKPD.

B.1 KEDUDUKAN:

Kecamatan Aluh - Aluh merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS:

Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B.3 FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan aluh – Aluh Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;

- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.

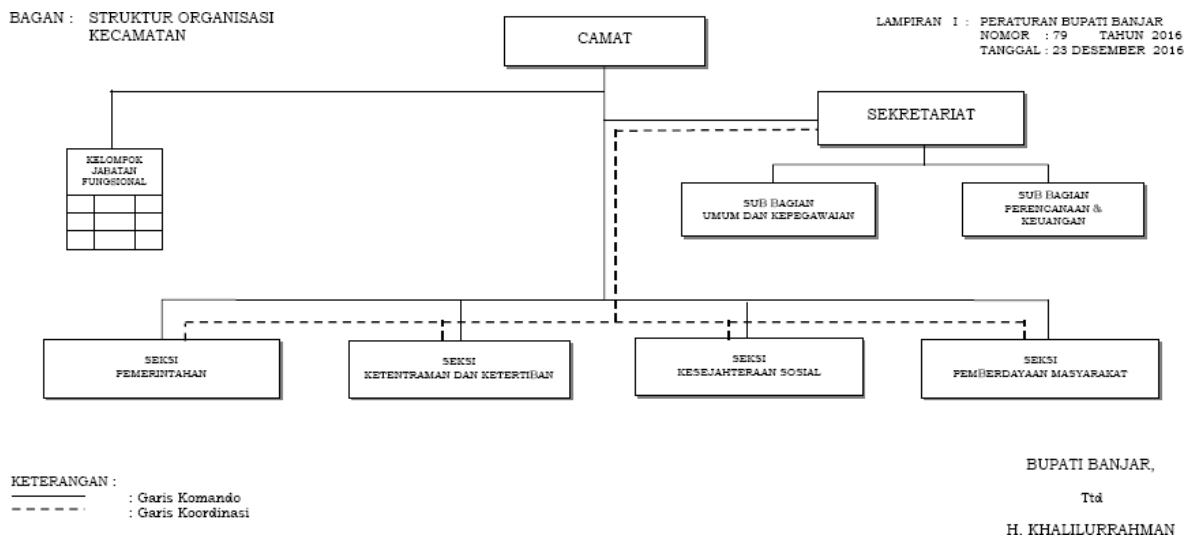
Susunan Organisasi Kecamatan Aluh - Aluh terdiri dari:

Susunan organisasi Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 2.1. Bagan SOTK Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar



C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Aluh – Aluh yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Aluh - Aluh masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel I
Tabel Permasalahan pada Kecamatan Aluh - Aluh

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan. Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi	Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan
		Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan pemerlu pelayanan Kesejahteraan	Kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan, peraturan perundang undangan.

		sosial dan kebencanaan	
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Kec.Aluh - Aluh Thn.2022-2026

D. ISU STRATEGIS

Kecamatan Aluh - Aluh secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Aluh - Aluh sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis

Kecamatan Aluh - Aluh adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2022 dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Aluh - Aluh mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Aluh - Aluh mendukung pencapaian misi Kelima Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi Kelima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Aluh - Aluh
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi yg tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang (Rujukan : Permenpan No. 14 Thn 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat)	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : SK IKU Kec. Aluh - Aluh

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2022-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2022 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN ALUH - ALUH
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aluh - Aluh	Indeks	73					2.165.714.141	Camat
					a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota				
					1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.555.446,741	Camat
					b	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			34,169,400	Kasi Pem
					2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			31,500,000	Kasi Kesejahteraan Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
					c	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
					1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu	Laporan	2 Laporan	7,513,400	Kasi PM
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bumdes Yang Terdata	Laporan	1 Laporan	31,485,300	Kasi PM
					d	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
					1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi	Laporan	2 Laporan	6,721,200	Kasi Trantib
					2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	Laporan	1 Laporan	2,651,600	Kasi Trantib
					3	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi / sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau kepolisian Negara Republik Indonesia yang terfasilitasi	Laporan	1 Laporan	9,250,000	Kasi Trantib
					e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
					1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Orang	2 Orang	49,513,200	Kasi Pem
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi tata pemerintahan desa yang terfasilitasi	Dokumen	Dokumen	2,956,200	Kasi Pemerintahan
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terfasilitasi	Dokumen	1 Dokumen	2,911,200	Kasi Pemerintahan
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa yang terfasilitasi	Dokumen	1 Dokumen	2,611,200	Kasi Pemerintahan
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang terfasilitasi	Dokumen	1 Dokumen	3,481,200	Kasi Pemerintahan
						Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	Dokumen	1 Dokumen	5,522,400	Kasi Pemerintahan

Sumber : Laporan Perjanjian Kinerja Perubahan Thn.2022 Kec.Aluh - Aluh

Tabel 2.2 di atas memuat data yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Aluh - Aluh tahun 2022 yang penetapannya dilakukan secara berjenjang (Pohon Kinerja) dimana Sasaran Strategis dan Program berada dibawah tanggung jawab Camat selaku Kepala SKPD Kecamatan Aluh – Aluh (eselon III a.) sedangkan Sasaran Program dan Kegiatan dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab Sekretariat dan Seksi (eselon III b dan IV).

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Aluh - Aluh Kab. Banjar tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$<40\%$	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target kinerja:	Realisasi kinerja:	Permasalahan (per urusan)	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Fungsi Penunjang	Kecamatan Aluh - Aluh		1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Rp. 1.555.607.740, - 100 Persen	Rp. 467.358.000, (30,04%). - 100 Persen		
					a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Rp. 1.555.607.740, - 100 Persen	Rp. 467.358.000, (30,04%). -100 Persen		
					1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN & Tambahan Penghasilan	Rp. 1.555.607.740, - 10 Orang	Rp. 467.358.000, (30,04%). - 11 Orang		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target kinerja:	Realisasi kinerja:	Permasalahan (per urusan)	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Rata-rata IKM Kecamatan	Rp 85.669.400 - 85,16 Persen	Rp 72.963.500 - 85,16 Persen		
				a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Rata-rata IKM Kecamatan	Rp. 85.669.400 - 85,16 Persen	Rp. 72.963.500 (60,19%) - 85,16 Persen		
					1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rp 51.500.000 (100%) - 1 Laporan	Rp. 51.500.000 (100%) - 1 Laporan		
			Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan	b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat	2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp . 34.169.400 - (62,81%)	Rp. 21.463.500 (62,81%) - (62,81%)	Implementasi pelimpahan urusan pemerintahan masih belum efektif	melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target kinerja:	Realisasi kinerja:	Permasalahan (per urusan)	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Banjar		daerah yang ada di kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan	Rp . 34.169.400 - (62,81%)	Rp. 21.463.500 (62,81%)	dilaksanakan	sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan; fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan, kewenangan lain yang diimpahkan
					1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	- Laporan Administrasi Kepegawaia - Laporan Barang Milik Daerah	Rp 2.202.684.141, -1 Laporan -5 Laporan	Rp 1.788.009.890, - (81,17%) -2 Laporan	Belum optimalnya pelayanan PATEN di Kecamatan Astambul	Melaksanakan pelayanan PATEN sesuai SOP yang berlaku

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target kinerja:	Realisasi kinerja:	Permasalahan (per urusan)	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
							<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan - Laporan Pelayanan PATEN - Laporan Penatausahaan Kantor - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> -10 Jenis Laporan -12 Laporan -12 Laporan -1 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> -10 Jenis Laporan -12 Laporan -12 Laporan -1 Laporan 		
			Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2019		c. Kegiatan Pelaksanaan Pemerintahan yang dilimpahkan ke		Rata-rata IKM Kecamatan	Rp 51.500.000	Rp 51.500.000 (100%)		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target kinerja:	Realisasi kinerja:	Permasalahan (per urusan)	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat		camat		100%	100%		
					1. Sub Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Rp 51.500.000 - 4Jenis laporan	Rp 51.500.000 (100%) - 4 jenis laporan		
				3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keurahan		Rata-rata IKM Kecamatan	Rp 25.911.800 84 Persen	Rp16.173.100 (62,42 %) 87,92 Persen		
					a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rata-rata IKM Kecamatan	Rp. 7.513.400,00 100% 1 Laporan	Rp 7.513.400,00 100 %)		

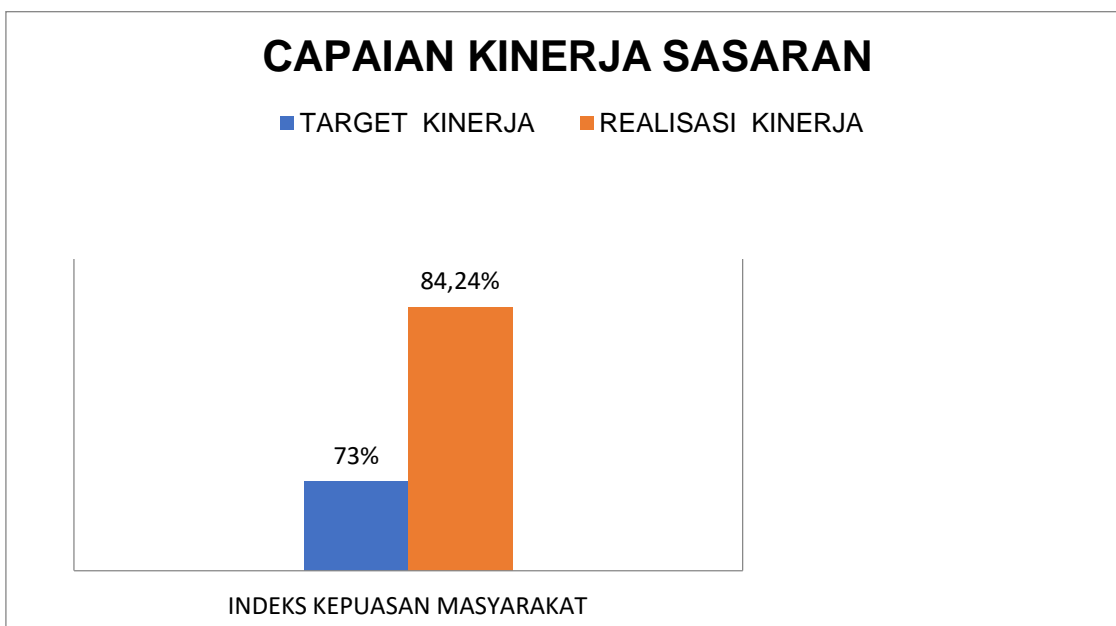
No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target kinerja:	Realisasi kinerja:	Permasalahan (per urusan)	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Rp. 53.455.300, (81,03%) - 4 jenis laporan	Rp 43.320.000 (81,03%) - 4 jenis laporan		
				4. Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban		Rata-rata IKM Kecamatan	Rp. 20.520.000 5 Jenis Laporan	Rp. 18.700.000 (91,13 %) 5 jenis Laporan		
					a. Kegiatan Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata IKM Kecamatan	Rp. 20.520.000 84 Persen	Rp. 18.700.000 (91,13 %) 87,92 Persen		
					1. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dam Tokoh Masyarakat	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Rp. 2.651.600 (22.62 %) 1 jenis laporan	Rp. 600.000 (22.62 %) 1 jenis laporan		
						Sinergitas dengan	5.000.000,00 50%	2.500.000,00 50%		

							Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan		
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

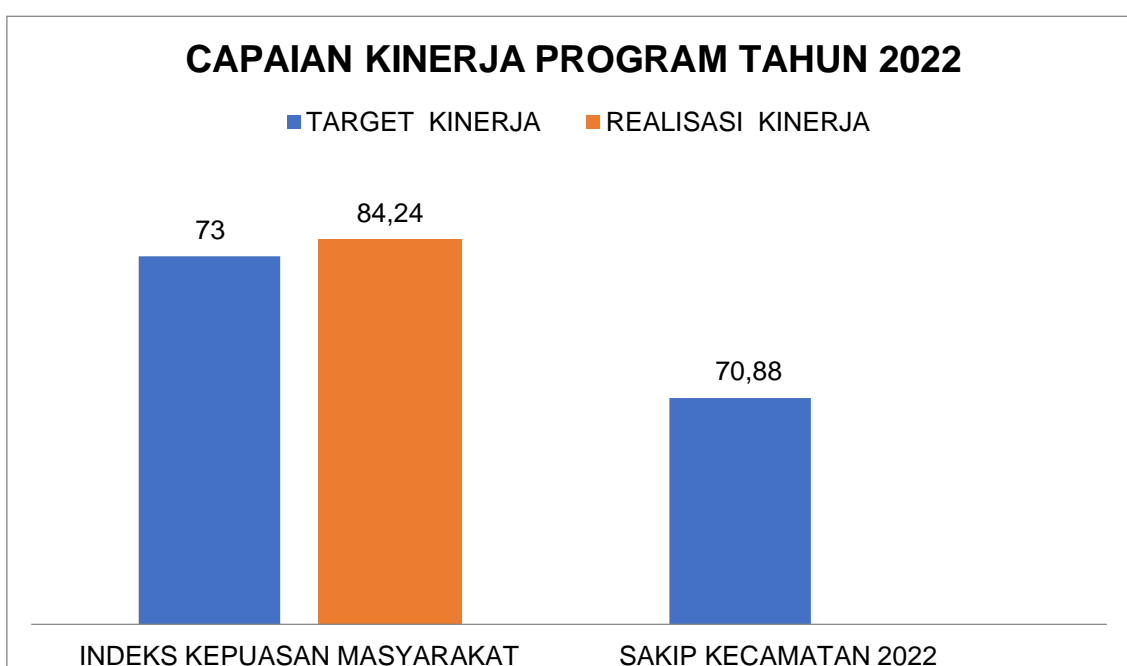
No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target kinerja:	Realisasi kinerja:	Permasalahan (per urusan)	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				5. Program Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum		Rata-rata IKM Kecamatan	32.263.200,00 (99,80%) 32.263.200,00	32.263.200,00 (99,80%) 32.263.200,00		
					a. Kegiatan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	Rata-rata IKM Kecamatan	32.263.200,00 (99,80%)	32.263.200,00 (99,80%)		
					1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik	Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	32.263.200,00 (99,80%) - 1 jenis laporan	32.263.200,00 (99,80%) -1 jenis laporan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target kinerja:	Realisasi kinerja:	Permasalahan (per urusan)	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia					

Sumber data : Laporan Fisik dan Keuangan ub.Desember 2022

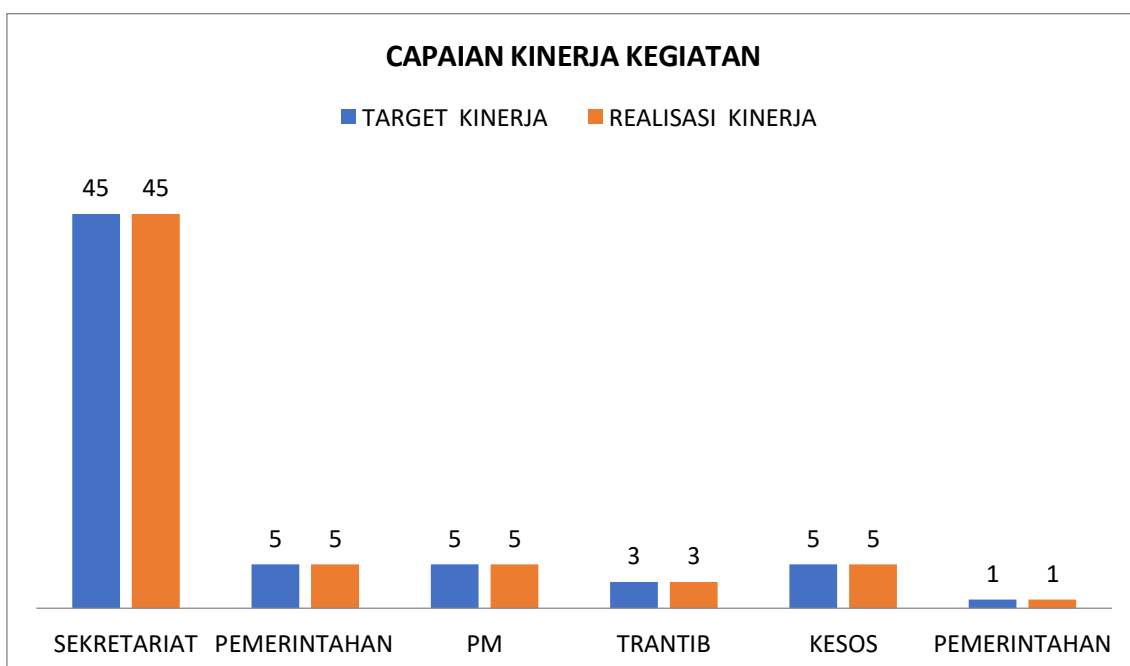


Indikator kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 84,24 bila di bandingkan dengan target 73% maka capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,65 % dengan capaian tersebut maka kinerja masuk dalam kategori **Cukup Berhasil**.



Indikator capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 86,65 bila di bandingkan dengan target 73% maka

capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,65 % dengan capaian tersebut maka kinerja masuk dalam kategori **CUKUP Berhasil**. Indikator capaian program SAKIP Kecamatan tahun 2022 sampai dengan waktu disusunnya laporan ini nilai SAKIP Kecamatan masih belum ada atau belum keluar karena Inspektorat belum melakukan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk nilai SAKIP Kecamatan Aluh Aluh tahun 2021 sebesar 51,67 masuk dalam kategori **Cukup**, dan 2022 Sebesar 70,88 masuk dalam katagori **Cukup Berhasil**.



1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Realisasi kinerja keseluruhan ada 45 Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 45 Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Cukup Berhasil**, adapun indikator kinerjakegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Laporan Administrasi Kepegawaian

Target 8 (delapan) laporan, realisasi 8 (delapan) laporan, capaian kinerja 100% (Berhasil), laporan terdiri dari :

1. Laporan Usul Kepangkatan dan Kenaikan Pangkat
 2. Laporan Kenaikan Gaji Berkala
 3. Laporan Permintaan Cuti
 4. Laporan Pembuatan Kartu (Karis/Karsu, Karpeg, Taspen)
 5. Laporan Pembuatan DUK, Nominatif, Daftar Susunan Pegawai
 6. SKP, SPJ, SPMT
 7. Laporan Mutasi dan Promosi
 8. Laporan Pemberhentian/Pensiun
- Laporan Penatausahaan Kantor
Target 12 (dua belas) laporan surat masuk/keluar yang di buat setiap bulan, realisasi 12 (dua belas) laporan surat masuk/keluar, capaian kinerja 100% (Berhasil)
 - Laporan Pelayanan PATEN
Target 12 (dua belas) laporan, realisasi 12 (dua belas) laporan, capaian kinerja 100% (Berhasil), laporan terdiri dari :
 1. Laporan Pindah/Datang
 2. Laporan Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP
 3. Laporan Dispensasi/Rekomendasi Nikah
 4. Laporan Legalisasi Kesaksian Pernikahan
 5. Laporan Legalisasi Proposal
 6. Laporan Surat Keterangan Domisili
 7. Laporan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
 8. Laporan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 9. Laporan Keterangan Kematian
 10. Laporan Legalisasi Surat/SK
 11. Laporan Legalisasi Surat Keterangan Waris
 12. Laporan Izin Mengumpulkan Orang Banyak
 - Laporan Barang Milik Daerah
Target 2 (dua) laporan, realisasi 2 (dua) laporan, capaian kinerja 100% (Berhasil), Laporan terdiri dari :
 1. Laporan Semesteran
 2. Laporan Tahunan

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 laporan yaitu laporan pemeliharaan bangunan gedung kantor Kecamatan Aluh - Aluh
- Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan
Target 10 (sepuluh) jenis laporan, realisasi 10 (sepuluh) jenis laporan, capaian kinerja 100% (Berhasil), laporan terdiri dari :
 1. Laporan Renstra dan Renja
 2. Laporan Perjanjian Kinerja
 3. Laporan RKT dan Rencana Aksi
 4. Laporan Capaian Kinerja
 5. Laporan IKU
 6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
 7. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 8. Dokumen RKA,DPA,DPPA
 9. Laporan Realisasi Fisik Keuangan dan Laporan Evaluasi RKPD
 10. Laporan Keuangan Unaudited/Audited
- **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
Realisasi kinerja keseluruhan ada 5 laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 5 laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**,
laporan terdiri dari :
 1. Laporan Kegiatan Koordinasi antar Pembakal
 2. Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Data Administrasi Pemerintahan Desa
 3. Laporan Kegiatan Fasilitasi Data Aset Desa
 4. Laporan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD
 5. Laporan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
Realisasi kinerja keseluruhan ada 5 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 5 Jenis Laporan maka di peroleh

capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, Laporan terdiri dari :

1. Laporan Kegiatan Evaluasi APBdesLaporan Evaluasi Rancangan Perdes APBDES
2. Laporan Evaluasi Realisasi Pelaksanaan APBDES
3. Laporan Musrenbang Kecamatan
4. Laporan Pembinaan Desa (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDES)
5. Laporan Pembinaan PKK

- **Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah**

Realisasi kinerja keseluruhan ada 3 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 3 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, Laporan terdiri dari :

1. Laporan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama
2. Laporan Kegiatan Pembinaan Linmas
3. Laporan Kegiatan Sosialisasi Perda

- **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**

Realisasi kinerja keseluruhan ada 5 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 5 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, Laporan terdiri dari :

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Keagamaan
3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepemudaan
4. Laporan Pelaksanaan Kecamatan Sehat
5. Laporan Penanganan Bencana Alam

- **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**

Realisasi kinerja keseluruhan ada 1 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 1 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**, Laporan terdiri dari :

1. Laporan Penyelenggaraan Peringatan HUT RI di Kecamatan

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Aluh - Aluh sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2022-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2017		2018		2020		2022	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	-	Persentase	63	100%	68	100%	Tidak Menjadi Indikator Lagi		Tidak Menjadi Indikator Lagi	
2	Persentase Pencapaian Target PAD	-	Persentase	55	100%	60	100%				
3	Persentase Penyelesaian Segmen Batas Desa	-	Persentase	100	100%	100	100%				
4	Persentase Penyelesaian Segmen Batas Kecamatan	-	Persentase	63	100%	68	100%				
5	Persentase Ketepatan Waktu Pemilihan Pembakal	-	Persentase	-	-	-	-				
6	Penyelesaian Tugas Umum Pemerintahan	-	Persentase	-	-	-	-				
7	SAKIP Kecamatan	Penilaian Inspektorat atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Indeks					51,27	Cukup	70,88	Cukup Berhasil

No.	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2017		2018		2020		2022	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai					70	81,40 %	87,92	104,7%
9	a. Laporan Administrasi Kepegawaian		Laporan	Belum Menjadi Indikator				8	100%	8	100%
	b. Laporan Penatausahaan Kantor		Laporan					12	100%	12	100%
	c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Laporan					0	100%	1	100%
	d. Laporan Pelayanan PATEN		Laporan					12	100%	12	100%
	e. Laporan Barang Milik Daerah		Laporan					2	100%	2	100%
	f. Laporan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan		Jenis Laporan					10	100%	10	100 %

No.	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2017		2018		2020		2022	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Jenis Laporan					6	100%	6	100%
11	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan		Jenis Laporan					6	100%	5	100%
12	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Kecamatan		Jenis Laporan					2	100%	3	100%
13	Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Jenis Laporan					5	100%	5	100%

Sumber : Renstra Perubahan Kec. Aluh Aluh Thn.2016-2022

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2018, dan 2019 Kecamatan Aluh - Aluh menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran namun berdasarkan Renstra Perubahan pada tahun 2021 dan 2022 terjadi perubahan indikator kinerja sasaran di mana Kecamatan Aluh Aluh menetapkan Indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.

Capaian kinerja Sasaran Program Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 86,65% di bandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 51,27 % maka pada tahun 2022 ini terdapat kenaikan yang sangat signifikan dengan nilai capaian kinerja melampaui target tahun 2022 yang sudah di tentukan.

Sedangkan untuk Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 Sebesar 70,88 ini terdapat kenaikan yang sangat signifikan.

Tabel 3.4
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun
2022-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aluh Aluh	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.749.956.741,-	1.755.568.421,
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0
				Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja	34.169.400	34.169.400

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan
				Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	31.500.000	51.500.000
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.998.700	60.968.700
			Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18.622.800	18.622.800
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	49.513.200	32.263.200
			Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.482.200	17.482.200

Untuk Anggaran Murni Kecamatan Aluh Aluh di Tahun 2022 sebesar Rp. 2.153.076.141,- dan setelah adanya Perubahan Anggaran menjadi Rp. 2.173.142.141,- Dari tabel diatas dapat kita lihat terdapat 4 Kegiatan yang anggarannya berkurang atau bertambah antara lain :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran murni untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.749.956.741,- dan setelah Perubahan menjadi Rp. 1.755.568.421,
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat, anggaran murni untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.500.000 dan setelah Perubahan menjadi Rp. 51.500.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Desa anggaran murni untuk kegiatan ini sebesar Rp 38.998.700 dan setelah Perubahan menjadi Rp 60.968.700.

4. Kegiatan Penyelenggaran urusan pemerintahan Umum anggaran murni untuk kegiatan ini sebesar Rp 49.513.200 dan setelah Perubahan menjadi Rp 32.263.200.

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2022-2026. Pencapaian kinerja tahun 2022 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2022, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Aluh - Aluh selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		
		5	8	
			K	Rp.
				2.165.714.141
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	1.555.446.741
	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	7	ASN	1.555.446.741
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata - rata IKM Kecamatan	87	Persen	65.669.400
	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	87	Persen	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kepemerintahan Di Kecamatan	4	Jenis Laporan	0
	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	87	Persen	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	8	Jenis Laporan	34.169.400
	Laporan Penatausahaan Kantor	12	Laporan	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1	Laporan	
	Laporan Pelayanan PATEN	12	Laporan	
	Laporan Barang Milk Daerah	2	Laporan	
	Laporan Dokumen Perencanaan dan Keuangan	10	Jenis Dokumen	
	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	87	Persen	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	5	Jenis Laporan	31.500.000
P OGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata IKM Kecamatan	87	Persen	38.998.700
	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	87	Persen	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	5	Jenis Laporan	38.998.700
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	87	Persen	18.622.800
	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	87	Persen	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	5	Jenis Laporan	18.622.800
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				49.513.200
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun , Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1	Jenis Laporan	49.513.200
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	4	Laporan	17.482.200
Rata-rata capaian kinerja (%)				
Predikat Kinerja				

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.Aluh - Aluh Thn.2022

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir di atas menunjukan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik dan Sasaran Program Terlaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 87,92. Untuk Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 sampai dengan waktu disusunnya laporan ini nilai SAKIP masih belum ada atau belum keluar hasilnya karena Inspektorat belum melakukan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk indikator kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2022 semua indikator kegiatan telah mencapai target akhir periode Renstra di tahun 2022.

A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2022 DAN TARGET NASIONAL

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022
Target Provinsi Dan Nasional

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM	SATUAN	REALISASI PROVINSI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6

Sumber :

Tabel 3.5 tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, Target Provinsi Dan Nasional di atas belum bisa memuat perbandingan capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Aluh Aluh dengan Target Provinsi dan Nasional mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible target Provinsi maupun nasional tersebut.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN,

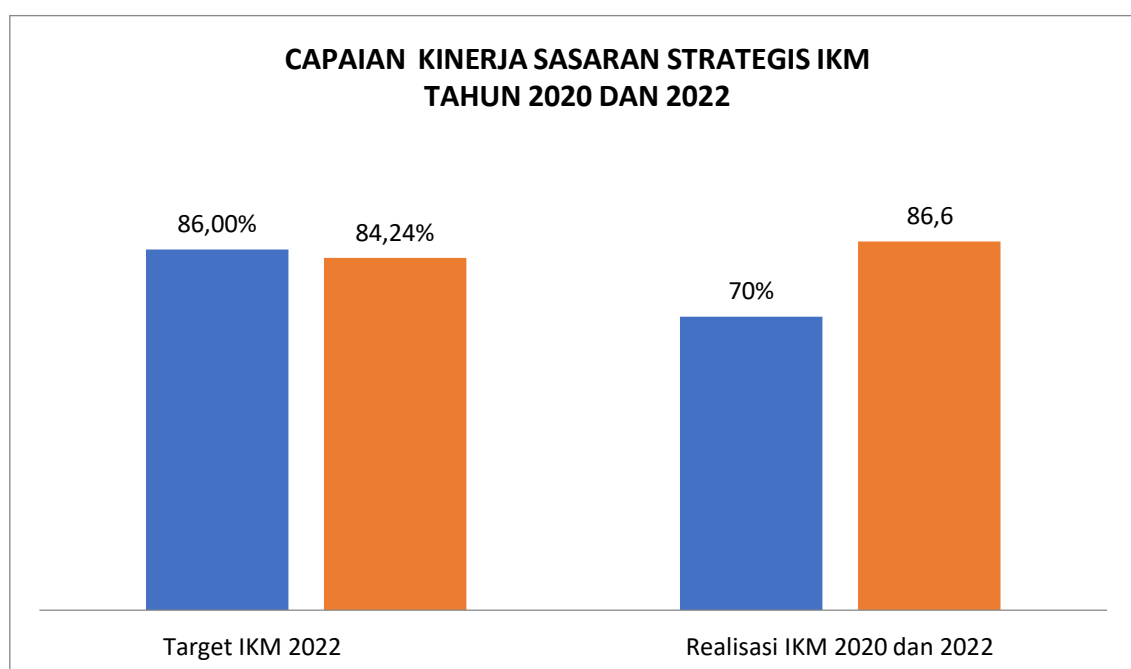
Pada tahun 2022 berdasarkan renstra perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, terdapat Indikator Kinerja dengan capaian **Berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%) Thn. 2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aluh Aluh	73	84,24	86,65 %

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Thn.2022 dan LkjlP Thn.2022 Kec.Aluh - Aluh



Capaian kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 84,24 % di bandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 70 % maka pada tahun 2022 ini terdapat Peningkatan Capaian kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat.

Faktor penghambat keberhasilan sasaran/program :

Untuk tahun 2022 Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aluh - Aluh realisasi sebesar 84,24 dari target 73 sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar 86,65 % dengan kategori Cukup **Berhasil, jika** dibandingkan dengan tahun 2021 di mana realisasi indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70% dari target 73% maka di peroleh capaian kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 83,33% artinya dilihat dari nilai persentase capaian kinerja tahun 2022 di bandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi peningkatan capaian dan telah memenuhi target kinerja sasaran program. Sedangkan Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 sampai dengan waktu disusunnya laporan ini nilai SAKIP masih belum ada atau belum keluar hasilnya karena Inspektorat belum melakukan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penghambat dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat biasanya responden yang melakukan pelayanan di kecamatan Aluh - Aluh tidak mau mengisi kuisioner yang sudah disediakan, hal ini biasanya dapat menjadi penyebab tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditargetkan sebelumnya. Dari hasil survey diperoleh nilai unsur pelayanan yang terendah adalah sarana dan prasarana (3,37) dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (3,41).

Rendahnya unsur SKM sarana dan prasarana disebabkan belum adanya aplikasi maupun nomer kontak terkait penanganan pengaduan pengguna layanan. Untuk unsur SKM Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan disebabkan belum adanya kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam Standar Pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Upaya perbaikan :

Yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Unsur Sarana dan antara lain:

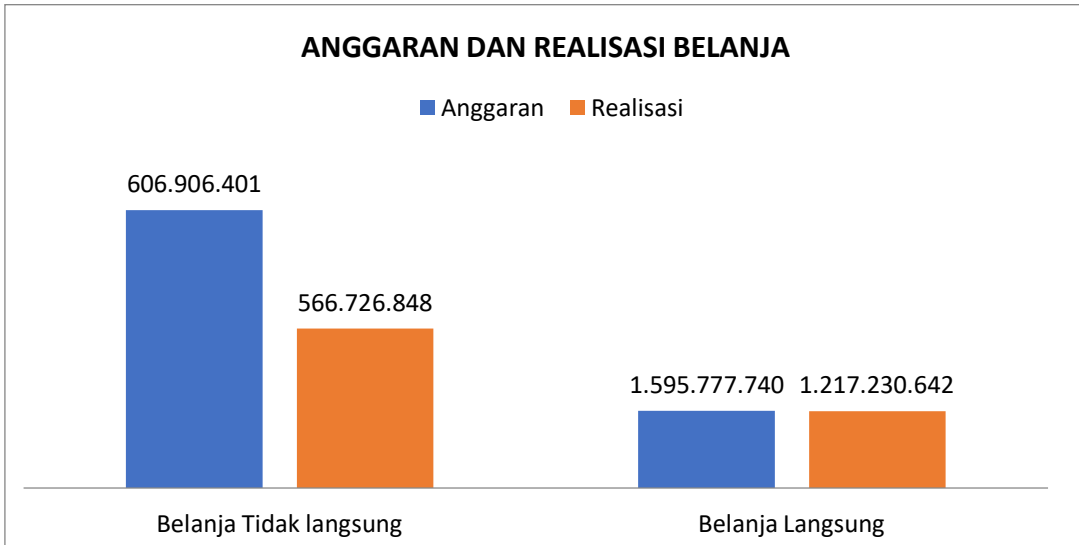
1. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut sesuai dengan skala prioritas;
2. Menganggarkan dalam DPA untuk pembelian dan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut.

Yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan antara lain:

1. Melakukan rapat rutin seluruh personil kantor untuk menyamakan persepsi tentang SPM;
2. Meningkatkan SDM personil kantor sesuai tupoksi masing masing melalui pelatihan dan bimtek;
3. Meningkatkan disiplin kerja seluruh personil baik yang ASN maupun tenaga honorer, sehingga produk pelayanan menghasilkan hasil yang sesuai seperti apa yang tercantum pada standar pelayanan.

C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Aluh - Aluh tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.202.684.141,- dengan realisasi Anggaran Rp. 1.783.957.490,00 (80,99%) dengan rincian untuk belanja langsung (belanja pegawai) dengan anggaran sebesar Rp. 1.595.777.740,dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.217.230.642, (76,28) dan untuk belanja tidak langsung (belanja barang dan jasa) dengan anggaran sebesar Rp. 577.364.401,- dengan realisasi sebesar Rp 537.430.848,- (93,08%).



Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Saaran Strategis/ Sasaran Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	84,24	99,71 %	1,955,165,841	1,984,707,841	98,51
a	Terlaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan							
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji ASN dan Tambahannya Penghasilan	10 orang	11 orang	100 %	1,744,146,421	1,752,598,421	99,51%
b	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jenis Laporan Pelayanan kepada masyarakat	45 Laporan	45 Laporan	100 %	34,169,400	34,169,400	100%

No	Saaran Strategis/ Sasaran Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	51,500,000	51,500,000	100%
c	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan							
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100 %	7.513.400	7.513.400	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	53,455,300	53,455,300	100%
d	Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum							
1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan Penegakan Peraturan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100 %	9,250,000	9,250,000	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	6,721,200	6,721,200	100%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%	2,651,600	2,651,600	100%

		t						
e	Terlaksananya Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum							
l	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Laporan	1 Laporan	100 %	32,263,200	32,263,200	100%
f	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Laporan	4 Laporan	100%	17,482,200	17,482,200	100%
TOTAL BELANJA						2,170,172,141	2.199.714.141	98,65%
BELANJA LANGSUNG						1,744,146,421	1,752,598,421	99,51%
BELANJA TIDAK LANGSUNG						426.025.720	447.115.720	85,28%

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kec.Aluh Aluh Thn.2022

Penjelasan :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan Sasaran Utama Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 84,24% dan dapat terealisasi dengan nilai 86,65% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 2.202.684.141 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **1.783.957.490,-**, dengan Persentase capaian **80,99** %.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki indikator kinerja Terpenuhinya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan dengan target 10 orang ASN dan terealisasi sampai dengan Desember 2022 sebanyak 11 orang yang didukung

dengan target anggaran sebesar Rp. 1,744,146,421 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1,752,598,421 dengan Persentase capaian 99,51%

3. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan memiliki indikator kinerja Jenis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan target tersusunnya 1 Laporan dan dapat terealisasi dengan tersusunnya 1 Laporan dengan capaian 100% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 51.000.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- dengan Persentase capaian 100%
4. Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan memiliki indikator kinerja Jenis Laporan Pelayanan kepada masyarakat dengan target tersusunnya 45 Laporan dan dapat terealisasi dengan tersusunnya 45 Laporan dengan capaian 100% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 34.169.400 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 34,169,400 dengan Persentase capaian 100%
5. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat memiliki indikator kinerja Jenis Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kecamatan dengan target tersusunnya 5 Laporan dan dapat terealisasi dengan tersusunnya 5 Laporan dengan capaian 100% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp.. 51,500,000 dan realisasi penyerapan

- anggaran sebesar Rp. **51,500,000** dengan Persentase capaian 100%.
6. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa memiliki indikator kinerja Jenis Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan target tersusunnya 5 Laporan dan dapat terealisasi dengan tersusunnya 5 Laporan dengan capaian 100% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp 60,968,700 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 60,968,700 dengan Persentase capaian 100%.
 7. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah memiliki indikator kinerja Jenis Laporan Penegakan Peraturan Daerah dengan target tersusunnya 3 Laporan dan dapat terealisasi dengan tersusunnya 3 Laporan dengan capaian 100% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 9.250.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.250.000 dengan Persentase capaian 100%.
 8. Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah memiliki indikator kinerja Jenis Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan target tersusunnya 1 Laporan dan dapat terealisasi dengan tersusunnya 1 Laporan dengan capaian 100% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 32,263,200 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 32,263,200 dengan Persentase capaian 100%.

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaiannya kinerja mencapai 100%. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 1.984.707.841 dari total anggaran

yang dialokasikan. kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak **85,669,400** dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 60,968,700 dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak dari total anggaran Rp 18,622,800 yang dialokasikan. kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran Rp 32,263,200 dari total anggaran yang dialokasikan.

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.8
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Saaran Strategis/ Sasaran Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
			(Rp)	(Rp)	
1	2	3	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	1,955,165,841	1,984,707,841	98,51
a	Terlaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan				
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	1,744,146,421	1,752,598,421	99,51%
b	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
1	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerinatahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jenis Laporan Pelayanan kepada masyarakat	34,169,400	34,169,400	100%
2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kecamatan	51,500,000	51,500,000	100%
c	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				

No	Saaran Strategis/ Sasaran Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
			(Rp)	(Rp)	
1	2	3	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	7.513.400	7.513.400	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	53,455,300	53,455,300	100%
d	Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum				
1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Lapoaran Penegakan Peraturan Daerah	9,250,000	9,250,000	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,721,200	6,721,200	100%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,651,600	2,651,600	100%
e	Terlaksananya Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum				
1	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	32,263,200	32,263,200	100%

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17,482,200	17,482,200	100%
--	---	---	------------	------------	------

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022 memperoleh nilai 70,88, dengan interpretasi predikat "BB" . Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi, maka pada tahun 2022

direkomendasikan kepada Camat Aluh - Aluh hal-hal sebagai berikut :

1. Dokumen Renstra belum digunakan sepenuhnya sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan;
2. Target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengatoksian anggaran;
3. Belum dibuatnya Laporan Kinerja secara berkala (Triwulan);
4. Pengukuran kinerja dilakukan belum sampai ke individu stat;
5. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
6. Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
7. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Belum terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya (Pemantauan hanya melalui pertemuan-pertemuan yang tidak terdokumentasi);
9. Tidak ada informasi capaian kinerja output yang dilaporkan;
10. Informasi mengenai kinerja belum mencantumkan asal sumber data.

D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Aluh - Aluh telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menggunakan dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan;

2. Target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan untuk dapat menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran;
3. Membuat Laporan Kinerja secara berkala (Triwulan);
4. Pengukuran kinerja dapat dilakukan sampai ke individu staf;
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan;
6. Hasil pengukuran kinerja untuk dapat dijadikan dasar sistem reward dan punishment;
7. Menyajikan Laporan Kinerja tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya (melalui pertemuan-pertemuan) untuk dapat didokumentasikan;
9. Menyajikan informasi capaian kinerja output;
10. Mencantumkan asal sumber data informasi kinerja.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari indikator kinerja yang diperjanjikan Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Aluh - Aluh masuk dalam kategori **Berhasil** dengan target 84 dan realisasi 84,24 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar dengan pagu anggaran Program sebesar Rp. 2,165,714,141 realisasi anggaran sebesar Rp. 2,153,076,141 atau sebesar 99,41%

hal ini disebabkan antara lain :

1. Pelayanan penanganan pengaduan serta saran dan masukan belum maksimal, dimana menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan.
2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat seperti fasilitas untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta anggaran pemeliharaan sarana yang memadai perlu di tingkatkan agar apabila terjadi kerusakan alat dapat segera di atasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama.
3. Belum adanya pelatihan ataupun bimbingan teknis oleh bidang Pemerintahan terhadap petugas Paten sementara perangkat komputer untuk aplikasi SIMPATEN telah tersedia sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum maksimal.

Dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang memperoleh nilai unsur pelayanan tertinggi adalah unsur Biaya/Tarif (3,65) sedangkan nilai unsur pelayanan terendah ada pada unsur Sarana dan Prasarana (3,37).

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelatihan aparatur kecamatan dalam rangka menambah wawasan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
3. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan laporan SAKIP.

Laporan Kinerja Kecamatan Aluh - Aluh tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
3. Surat Inspektorat Kabupaten Banjar No. 700/731/IP Tanggal 20 Agustus 2022 Perihal Laporan Optimalisasi Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA.2020
4. Rekap Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022